

Perlindungan hukum atas aset tetap BUMN sehubungan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 (analisa terhadap kasus PT. Agra Citra Kharisma (PT ACK VS PT. Kereta Api Indonesia Persero di pengadilan negeri (PN) Medan = Legal protection of state owned enterprises fixed assets in connection with the constitutional court decision number 62 puu xi 2013 analysis of pt agra citra kharisma pt ack vs pt kereta api indonesia persero case in medan district court

Fahresha Muchtar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20432976&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Perlindungan hukum atas aset tetap BUMN merupakan suatu hal yang penting bagi BUMN, Perlindungan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, maka terhadap aset tetap BUMN akan berlaku ketentuan-ketentuan yang juga berlaku bagi aset Negara lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya hakim masih kesulitan untuk memahami penerapan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Kondisi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 merupakan kondisi yang unik bagi BUMN, mengingat kedepannya BUMN disatu sisi akan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap intervensi pemerintah, ketika mengalami sebuah permasalahan terkait aset tetapnya, yaitu BUMN akan cenderung mengharapkan adanya campur tangan pemerintah sebagai penyelamat dengan menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang publik dalam rangka perlindungan atas aset tetap BUMN. Namun di sisi lain BUMN juga dituntut untuk mandiri, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan tugas Direksi sebagai pihak yang mengelola kekayaan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan dengan penuh itikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan perseroan.

<hr>The legal protection of fixed assets of State Owned Enterprises (SOE) is an important thing for the SOE, legal protection is highly influenced by the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-X / 2013. With the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-XI / 2013, the regulations about SOE fixed assets will follow the regulations of State assets. However, in practice, judges still difficult to understand the application of the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013. Condition after the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013 is a unique situation for SOE, whereas SOE on one side will have a high level of dependency on government intervention, when experiencing a problem related to its fixed asset (the companies will tend to expect their government interference as a savior by implementing public legislation in order to protect its fixed assets of SOEs). But on the other side, the SOEs are also required to be independent, it is as stated in the provisions of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, related to the duties of Directors as those who manage the wealth of the company to achieve the aims and objectives of the company with full good faith and full responsibility, where it is done solely for the benefit of the company.